

sumber pendanaannya.

Realitas politik menunjukkan, bahwa politisi yang tidak punya dana; sudah hampir dapat dipastikan akan kalah dan tersingkir. Faktanya politisi tidak hanya memerlukan dana kampanye yang cukup besar untuk meraih dukungan dari konstituen. Justru umumnya politisi sebelumnya membutuhkan dana untuk meraih restu dan dukungan walaupun tidak resmi dari elite partai, yang mengusungnya. Sumber dana politik umumnya dapat dikategorikan pada dua sumber. Pertama, bersumber pada sektor negara atau menggunakan APBN. Kedua, dana politik yang bersumber dari sektor publik atau masyarakat. Dari perkembangan sistem politik di Indonesia, yang tercermin dari perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu yang digunakan sekarang, semata-mata sumber dana politik dalam tataran infra struktur politik adalah dari sektor masyarakat. Pada pasal 129 UU No. 10 Thn 2008 tentang Pemilu sumber dana itu meliputi:

- a. Partai politik.
- b. Caleg dari partai politik yang bersangkutan.
- c. Sumbangan pihak lain yang sah menurut hukum.

Berdasarkan gambaran fakta di lapangan, maka terlihat bahwa sumber dana politik itu, dominan dari kategori butir (b), dan butir (c) diatas. Kategori sumber dana pada butir (b),

tersebut adalah caleg yang memiliki uang sendiri. Politisi dari kategori ini, umumnya kelompok kaya atau pengusaha, yang umumnya berpikir dalam perspektif "usaha", dimana dana yang sudah dikeluarkan akan kembali juga dalam bentuk dana, berpolitik untuk "pengembalian modal" mungkin plus keuntungan. Sehingga kinerja politik menjadi nomor dua. Sedangkan kategori sumber dana pada butir (c), adalah kelompok pendana perorangan atau mungkin juga sindikasi. Yang memberikan donasi, dengan syarat adanya pengembalian dalam "perlindungan atau kepentingan politik tertentu". Donasi yang diberikan mengikat si politisi, "harus mengikuti kepentingan" dari sumber si pemberi donasi. Kinerja politik dan moralitas politik menjadi nomor dua.

Hal ideal, yang semestinya berlangsung dalam mekanisme dan politik yang sehat adalah si pemberi donasi, mengharapkan out-put politik adalah kebijakan publik yang berkualitas. Dalam hal ini, demokrasi menjadi instrumen yang dapat diharapkan mendatangkan kebijakan yang adil, yang mendatangkan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Mekanisme politik yang ideal tersebut, mau tidak mau bila didukung oleh si pemberi donasi yang memiliki harapan terwujudnya tatakelola pemerintahan yang lebih baik, untuk mencapai tujuan bernegara. Pengalaman menunjukan si pemberi dana dalam kategori tersebut, adalah kalangan masyarakat menengah yang sosial ekonomi mampu, disamping memiliki kesadaran, karakter

encang-kencangnya ketika pemerintah, terutama penegak hukum, lemah dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sebaliknya demokrasi seharusnya membesi lewat hukum yang keras menolak terhadap politik kekerasan. Membesinya demokrasi membuat satu-satunya perjuangan politik yang sah adalah persuasi dan dijalankan dalam koridor kebebasan dasar manusia.

Perjuangan politik lewat kekerasan tak ayal akan mampu memberangus kebebasan dan meloloskan otoritarianisme baru. Lebih jauh lagi, kebebasan yang menjadi hak suatu masyarakat hendaknya disertai ketaatan kepada hukum, kebebasan dan ketaatan kepada hukum tampak seakan-akan bertentangan. Namun, hakikat masyarakat madani justru ada dalam kesatuan nilai-nilai itu. Kebebasan akan berwujud dengan baik hanya dalam tertib hukum. Tanpa adanya tertib hukum, maka yang akan terjadi adalah munculnya hubungan antarpribadi dan kelompok yang ditandai dengan dominasi yang kuat terhadap yang lemah. Demikian pula, kebebasan tanpa tertib hukum akan membuat masyarakat terperangkap ke dalam tatanan hukum rimba, sehingga akhirnya menjadi masyarakat yang tanpa keadaban. Dalam kondisi seperti itu, perbedaan bisa menjadi pertentangan, dan pertentangan akan mengundang kekerasan dalam setiap penyelesaian perbedaan yang mereka hadapi.

Kita sepakat bahwa partai politik itu merupakan lokomotif untuk berjalannya demokrasi, sehingga penting untuk dibangun, dibesarkan, dan diperkuat peran dan tanggung jawabnya dalam membawa Negeri ini pada tujuannya. Oleh karena itu hukum harus mendorong dan memaksa (bahkan bilamana perlu dengan sanksi) agar partai politik melakukan fungsinya sesuai dengan hakikat dibentuknya partai politik yakni: 1) setiap parpol wajib melakukan edukasi politik secara sistematis, terprogram, dan berkesinambungan; 2) membangun sistem rekrutmen politik yang lebih transparan, partisipatif, selektif, kompetitif, dan akuntabel; 3) melakukan penyiapan secara serius terhadap kader-kadernya sebagai calon-calon pemimpin bangsa yang handal dan terpercay di masa depan antara lain memiliki ciri: tampilan fisik *keren*, akhlaq mulia, otak encer, hati lembut, perasaan peka, motivasi tinggi, peduli sosial; 4) membangun etika politik yang santun dan bermartabat yang terinternalisasi pada para anggotanya; 5) menyusun dengan baik visi, misi, platform, dan program kerja yang senantiasa ditawarkan kepada publik; 6) mengagregasi dan memperjuangkan secara sungguh-sungguh tuntutan akan kebutuhan rakyat yang riil dan sedapat mungkin mewujudkannya; 7) menjalin komunikasi politik yang sehat antar parpol sehingga terjadi koalisi ideologis secara permanen; 8) memisahkan (tidak rangkap jabatan) antara kepengurusan struktural par-

PROFIL PEMIMPIN TERPILIH DALAM PANDANGAN ISLAM



Drs. Maman, M.Ag
Dosen FKIP dan Sekretaris LPPSI Unpas Bandung

Pendahuluan

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan *amanah* kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan dan menolak untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zhalim dan amat bodoh” (QS. al-Ahzab: 72). Ayat ini, menurut para ahli tafsir merupakan salah satu ayat yang mendeklarasikan manusia sebagai pemegang awal tongkat kepemimpinan sebelum bumi ini diciptakan dalam bentuk fisik atau materi hingga sekarang, bahkan sampai bumi ini nanti berada dalam ketiadaan kembali. Tegasnya ayat tersebut mengisyaratkan bahwa manusia diciptakan Allah untuk menjadi pemimpin, yakni sebagai khalifatullah di muka bumi.

Konteks ayat tersebut dengan kepemimpinan bahwa Islam memandang bahwa setiap individu adalah pemimpin; apakah ia menjadi pemimpin dalam skala lokal, regional, nasional atau sampai skala internasional. Pemimpin kampung, wilayah, negara atau organisasi (pemimpin kelas, pemimpin jurusan, fakultas, atau minimalnya ia menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri). Hal ini

diungkapkan pula dalam sabda Nabi: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan

akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Terkait dengan masalah pemimpin dan kepemimpinan dalam pandangan Islam, sesungguhnya banyak masalah yang harus dibahas. Tulisan ini tidak akan membahas masalah pemimpin dan kepemimpinan secara luas dan detil. Namun akan membatasinya kepada masalah-masalah sebagai berikut: Pertama, masalah tatacara memilih atau mengangkat pemimpin; Kedua, sifat-sifat pemimpin yang harus dipilih; Ketiga, apa saja tugas dan tanggungjawab pemimpin terpilih.

Cara Mengangkat Pemimpin

Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam literatur keislaman dan sama-sama mengandung arti pemimpin atau kepemimpinan. Pertama, *imam* (pemimpin), dan kepemimpinannya disebut *imamah*; Kedua, *khalifah* (pemimpin), dan kepemimpinannya disebut *khilafah*; Ketiga, *wali* (pemimpin), dan kepemimpinannya disebut *wilayah*; Keempat, *sulthan*, (pemimpin), dan kepemimpinannya disebut *sulthanayah*; Kelima, *malik* (pemimpin), dan kepemimpinannya disebut *mulkiyah*; Keenam, *amir*, (pemimpin), dan kepemimpinannya disebut *ima-*

rah. Keenam istilah ini, secara umum artinya sama, yaitu pemimpin atau orang yang memiliki kekuasaan di suatu daerah atau negara, atau orang memimpin atau yang menguasai di suatu daerah atau suatu negara. Sekali pun artinya secara teknis atau istilah memiliki perbedaan, namun antara satu istilah dengan istilah lainnya memiliki arti yang tidak jauh berbeda, yaitu mengandung makna yang ada hubungannya dengan kepemimpinan.

Keberadaan pemimpin sesungguhnya dalam ajaran Islam merupakan salah tugas manusia di muka ini, yakni sebagai khalifah Allah. Saking pentingnya masalah kepemimpinan ini, Alquran banyak menyebut istilah yang mengandung arti pemimpin dan kepemimpinan. Menurut Quraisy Syihab ada 236 kali dalam bentuk kata benda seperti pemimpin; 112 kali dalam bentuk kata kerja seperti memimpin. Sedangkan masalah yang berhubungan dengan tata cara atau teknis memilih atau mengangkat pemimpin, para ahli sejarah Islam menyatakan bahwa dalam Alquran tidak ada aturan dan ketentuannya secara jelas dan detil. Seperti yang terjadi pada sahabat-sahabat Nabi Saw yang empat (*khufa al-Rasyidin*) bahwa mereka dipilih dan diangkat menjadi khalifah (pemimpin umat Islam saat itu) dengan menggunakan cara yang berbeda-beda. Sahabat Abu Bakar al-Shiddiq dipilih berdasarkan kepada kesepakatan para elit umat Islam saat itu. Sahabat Umar bin Khathab dipilih dengan menggunakan cara pen-

calonan tunggal. Sahabat Utsma bin Affan dipilih langsung berdasarkan kepada mandat atau wasiat Umar bin Khathab yang menjadi pemimpin sebelumnya. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib diangkat berdasarkan loyalitas umat melalui *bai'at*.

Berdasarkan kepada cara-cara yang digunakan oleh umat Islam dalam memilih pemimpinnya terhadap para sahabat Nabi yang empat, maka dapat disimpulkan, bahwa minimalnya ada empat cara milih pemimpin menuut Islam; Pertama, melalui kesepakatan para elit umat; Kedua, menggunakan cara pencalonan tunggal; Ketiga, melalui mandat atau wasiat pemimpin sebelumnya; Keempat, melalui *bai'at* berdasarkan loyalitas umat. Melihat keempat cara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tata cara memilih pemimpin dalam ajaran Islam tidak ada ketentuannya yang pasti, bisa melalui para wakil rakyat (DPR), atau melalui cara langsung rakyat memilih seperti yang dilaksanakan di negara kita sekarang ini. Caranya bagaimana pun boleh-boleh saja, yang penting tidak melanggar norma-norma *insaniyah* dan norma-norma *ilahiyah*.

Syarat-syarat Pemimpin yang Dipilih

Salah satu syarat atau ciri-ciri pemimpin yang harus dipilih menurut ajaran Islam adalah bahwa ia harus beragama Islam. Saking pentingnya syarat pemimpin ini, sehingga dalam Alquran terdapat tujuh ayat yang melarang memilih pemimpin

di luar umat Islam, di antaranya QS. Ali Imran Ayat 28; QS. al-Nisa Ayat 89 sareng 144; QS. al-Maidah Ayat 51. Syarat pemimpin yang lainnya adalah secara ideal harus memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Saw yaitu: Pertama, bener (*shiddiq*); Kedua, jujur (*amanah*); Ketiga, cerdas (*fathanah*); Keempat, menyampaikan (*tabligh*). Selain keempat syarat tersebut, juga Nabi Muhammad Saw memiliki sifat lemah lembut, kepribadian yang matang, tidak tergesa-gesa atau emosional, tidak bersikap keras lagi berhati kasar (QS. Ali Imran, 3: 159). Sekalipun sifat-sifat tersebut disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, tapi alangkah baiknya jika sifat-sifat tersebut dimiliki oleh kita selaku umat Islam, terutama yang hendak menjadi pemimpin di daerahnya atau di negaranya, karena seluruh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw pasti menjadi contoh baik bagi semua umatnya (QS. al-Ahzab, 33: 21).

Atas dasar itulah, maka kewajiban utama bagi umat Islam adalah mencontoh perilakunya dan menerapkannya dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek kepemimpinan. Jika hal itu sudah bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari maka akan lahir suatu negara yang subur, makmur, gemah ripah lohjinawi (*baldah thayyibah wa robbun ghafur*), seperti yang digambarkan dalam Alquran Surat Saba, 34: 15: "Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah

kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (Kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun".

Tetapi sebaliknya, jika suatu daerah atau negara menerapkan aturan-aturan yang sudah menyimpang dari perintah Allah melalui para Rasul-Nya, maka Allah pasti akan murka dan akan mengancamnya dengan berbagai macam musibah. Firman-Nya: "Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasinya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali" (QS. al-Nisaa, 4: 115). Kemudian jika pemimpinnya zholim, maka rakyatnya pun akan banyak yang zholim. Sedangkan murka Allah tidak hanya menimpa orang-orang zholim saja, melainkan orang-orang yang tidak berdosa juga akan merasakannya: "Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zholim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya" (QS. al-Anfal, 8: 25)

Tugas dan Tanggungjawab Pemimpin

Berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab pemimpin, ada

sebuah pepatah yang berbunyi: "Jika rumahmu kebakaran, maka selamatkan dirimu belakangan! Jika di daerahmu terjadi musim panen, maka makanlah kamu belakangan! Tapi jika ada musuh menyerang daerahmu/wargamu, maka berdirilah kamu paling depan untuk menyelamatkannya!". Jika negara kita memiliki pemimpin yang mentalnya seperti yang terdapat dalam pepatah tersebut, maka bisa dipastikan tidak akan ada warganya yang miskin atau kelaparan. Dalam istilah lain, keberadaan daerah-daerah di negara tersebut akan subur, makmur, gemah ripah lohjinawi, dan semua warganya akan repeh-rapih; *silih asah, silih asuh, dan silih asih*, seperti yang digambarkan dalam Alquran tersebut di atas, yakni *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*.

Tanggung jawab pemimpin yang seperti itu, di zaman sekarang khususnya di negara kita tentu sangat jarang sekali adanya, malah bisa disebut "tidak ada.". Sekalipun ada, tentu tergolong langka atau bisa dikatakan 1001 (seribu satu). Dikatakan langka, karena jika ditilik dari kenyataan di zaman sekarang, untuk menjadi pemimpin di negara kita saling berebutan, sehingga muncul suatu perilaku arogan, gontok-gontokan di antara para pendukung dalam dukung-mendukung atas calon yang dijagokannya, bahkan di antara mereka ada yang berani saling bunuh-membunuh, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Selain itu, dalam Alquran ban-

yat ayat yang menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab para Rasul Allah terhadap umatnya. Tugas-tugas Rasul tersebut, oleh para ahli tafsir diberi makna juga sebagai tugas dan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya. Di antara tugas-tugas tersebut adalah: (1) menyampaikan kebenaran ayat-ayat Allah kepada seluruh umat manusia; (2) membersihkan jiwa umat manusia dari sifat-sifat yang jelek, yang dapat mencelekkakan dirinya; (3) mengajarkan kitab Allah dan keutamaan ilmu; (4) membimbing dan membina tata cara ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah, ataupun yang berhubungan dengan manusia; (5) membebaskan masyarakat dari kefakiran dan kemiskinan; (6) mewujudkan keamanan dan ketentraman hidup di tengah masyarakat.

Penutup

Sebagai kesimpulan dari tulisan ini adalah, bahwa jika seluruh pemimpin yang ada di negara tercinta ini, memiliki sifat-sifat dan tanggung jawab seperti tersebut di atas, mangka bisa dipastikan tidak akan ada warga yang miskin, atau kelaparan. Kehidupan akan subur-makmur, aman lagi tenteram, rezekinya datang kepada semua penduduknya dengan melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi jika pemimpinnya zholim,

maka penduduknya akan mengingkari nikmat-nikmat Allah; Akhirnya Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat (QS. al-Nahl, 16: 112). Oleh sebab itu, bagi kita dalam memilih pemimpin harus hati-hati dan waspada, sebab yang namanya pemimpin akan menentukan kehidupan warganya, baik di masa sekarang ataupun di masa-masa yang akan datang. Sekalipun untuk mencapai kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera, bukan saja tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin saja, tetapi juga merupakan tugas semua pihak terutama semua masyarakat yang akan menjadi pilihannya. *Wal-lohu A'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, Endang Saefuddin, 1986, *Wawasan Islam, Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Ummatnya*, Jakarta: Rajawali
- Mawardi, Imam. 2010. *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Islam*. Jakarta: DarulFalah
- Shihab, M. Quraissy, 1997, *Wawasan al-Quran, Tafsir Maudlu'i terhadap Berbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan
- Syari'ati, Ali, 1994, *Imamah dan Ummah*, Bandung: Mizan.